



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN TAHUN 2025 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa diperlukan komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi terkait dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui upaya pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah perlu mengatur rencana aksi tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025 – 2028;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN TAHUN 2025 – 2028.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen yang memuat strategi, program kegiatan dan sasaran yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait dalam melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
2. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
3. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya, mengambil keputusan, dan berusaha secara mandiri.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korban, secara khusus kekerasan berbasis gender.
5. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi.

6. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya.
7. Korban Kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan pengendalian penduduk.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RAD sebagai acuan bagi Daerah dan masyarakat dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran program kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Tujuan disusunnya RAD sebagai berikut:
  - a. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan Anak korban kekerasan;
  - b. mewujudkan kegiatan pencegahan, penanganan maupun pemberdayaan terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- c. mengintegrasikan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- d. meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
- e. meningkatkan jejaring antar lembaga.

## BAB II

### PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang menyusun RAD.
- (2) Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Sistematika RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
  - a. latar belakang;
  - b. tujuan;
  - c. prinsip;
  - d. sasaran;
  - e. ruang lingkup;
  - f. konsep; dan
  - g. matriks.
- (2) Matriks RAD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, terdiri dari:
  - a. strategi implementasi;
  - b. target capaian;
  - c. program;
  - d. kegiatan;
  - e. sub kegiatan;

- f. aktivitas;
  - g. indikator capaian; dan
  - h. penanggung jawab.
- (3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. perangkat daerah kabupaten/kota; dan
  - d. masyarakat.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
- a. mandiri;
  - b. bersama-sama;
  - c. berkolaborasi; dan/atau
  - d. berjejaring antar lembaga.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peninjauan langsung ke lapangan; dan/atau
  - b. pemantauan tidak langsung melalui rapat koordinasi.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal:
  - a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
  - b. apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan RAD kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Januari 2025

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
TAHUN 2025 – 2028

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2025 – 2028

A. Latar Belakang

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terus diupayakan oleh pemerintah secara khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyikapi secara serius permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Keseriusan pemerintah DIY tercermin dengan diterbitkan dan diberlakukannya Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan Daerah tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban harus didasarkan pada asas penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, dan pemberdayaan.

Perlindungan terhadap korban bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada korban, dan melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan pemenuhan hak-hak korban kekerasan mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan cara membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan, melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan, membentuk sistem pencegahan kekerasan, melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan

anak korban kekerasan, dan memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat.

Penanganan korban kekerasan yang dimaksud dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terwujud dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap korban yang dilakukan secara terpadu oleh lembaga layanan termasuk adanya layanan berjejaring. Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan mencakup pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling, pelayanan pendampingan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan hukum, dan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Sedangkan aspek pemberdayaan korban kekerasan dapat berupa pelatihan kerja, usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama, dan bantuan permodalan.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mengimplementasikan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini menyusun RAD yang diberlakukan setiap 5 (lima) tahun. RAD yang terbentuk diharapkan menjadi acuan bagi organisasi pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Sejak berlakunya Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Rencana Aksi Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2013 – 2017.

RAD Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2017 tersebut tetap mengacu pada 3 (tiga) aspek utama yaitu pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan korban kekerasan. RAD sudah seharusnya dimonitoring, evaluasi, dan dilanjutkan untuk menjadi acuan setiap institusi terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Oleh karena itu diperlukan RAD berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan agar implemetasi dari Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tetap berjalan semata-mata untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan di DIY.

Maka, pada tahun 2025 disusunlah RAD Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY yang diberlakukan hingga tahun 2028. Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025 sampai dengan 2028 tetap mengacu pada ketiga aspek utama yaitu pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan korban kekerasan karena masih sangat relevan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

## B. Tujuan

RAD tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi terkait dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui upaya pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2028.

## C. Prinsip

Prinsip yang dibangun dalam RAD Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tetap mengacu pada prinsip perlindungan korban kekerasan yaitu

1. Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi korban
5. Pemberdayaan

Selain itu dalam memberikan layanan bagi korban kekerasan prinsip yang melekat dalam mengimplementasikan RAD Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah empati, rahasia, *non-judgemental*, aman dan nyaman, kesetaraan gender, non-diskriminasi, kemudahan akses layanan, dan keputusan pada korban.

## D. Sasaran

RAD Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2025 sampai dengan 2028 agar diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi terkait.

#### E. Ruang Lingkup RAD

Ruang Lingkup RAD Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terdapat 3 aspek utama yaitu pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan korban kekerasan.

##### 1. Pencegahan Kekerasan

Pencegahan kekerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

##### 2. Penanganan Korban Kekerasan

Penanganan/pelayanan korban kekerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan, dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

##### 3. Pemberdayaan bagi Korban Kekerasan

Pemberdayaan bagi korban kekerasan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mendapat layanan kesehatan dan/atau sosial.

#### F. Konsep RAD

RAD Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025-2028 disusun dengan konsep yang mengacu pada strategi implementasi pencegahan kekerasan, penanganan korban kekerasan, dan pemberdayaan.

##### 1. Strategi Implementasi Pencegahan

Strategi implementasi pencegahan meliputi :

- a. Melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat, dengan target capaian terselenggaranya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pertemuan di masyarakat, media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas di masyarakat.
- b. Edukasi anti kekerasan di institusi pendidikan, dengan target capaian terintegrasinya pendidikan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan dalam aktivitas di satuan pendidikan kewenangan provinsi

- c. Penyusunan KIE pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA), dengan target capaian tersusunnya media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan, penanganan, layanan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - d. Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga, dengan target capaian:
    - 1) Terselenggaranya pelatihan kepada orang tua , pengasuh dan pengasuh alternatif tentang pengasuhan yang positif, komunikasi yang efektif, sebagai upaya pencegahan kekerasan Kolaborasi dan kemitraan
    - 2) Terselenggaranya Layanan konseling bagi keluarga dalam upaya Peningkatan kualitas Keluarga
    - 3) Terselenggaranya layanan telekonseling bagi anak dan keluarga untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - e. Kolaborasi dan Kemitraan, dengan target capaian terjalinnya kerjasama antar lembaga ( termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.
  - f. Mewujudkan wilayah/ Kawasan ramah bagi perempuan dan anak, dengan target capaian terwujudnya Provinsi Ramah Perempuan dan Peduli Anak
  - g. Penelitian dan data, dengan target capaian tersedianya data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Strategi Implementasi Penanganan
- Strategi implementasi penanganan meliputi:
- a. Layanan intervensi dini yang cepat dan berkualitas, dengan target capaian terlatihnya Tim PPK, SATGAS PPK, SATGAS TPKS, Petugas Lembaga Layanan dalam respon awal terhadap korban kekerasan
  - b. Fasilitasi lembaga penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis masyarakat, dengan target capaian terbentuknya dan terlatihnya kelompok masyarakat untuk Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan.
  - c. Pengelolaan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan target capaian fasilitasi lembaga layanan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan
  - d. Penyelenggaraan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan target capaian sebagai berikut:

- 1) Terpenuhiya layanan awal bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban
- 2) Terpenuhiya layanan Penjangkauan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban
- 3) Tersedianya perlindungan sementara dan jangka panjang bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam kondisi darurat dan/atau mengancam jiwa
- 4) Terpenuhiya layanan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan korban melalui mekanisme rujukan
- 5) Tersedianya layanan kesehatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban dan kemudahan akses bagi korban agar korban segera tertangani
- 6) Tersedianya tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan konseling dan/atau pendampingan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan, secara khusus memiliki perspektif yang tidak bias gender
- 7) Tersedianya tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan konsultasi hukum dan/atau pendampingan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, secara khusus memiliki perspektif yang tidak bias gender
- 8) Tersedianya tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus memberikan layanan psikososial dan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan korban berdasarkan asesmen, secara khusus memiliki perspektif yang tidak bias gender
- 9) Tersedianya Layanan Penegakan hukum bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
- 10) Tersedianya layanan yang membantu korban untuk bisa kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat secara lebih aman

### 3. Strategi Implementasi Pemberdayaan

Strategi implementasi pemberdayaan meliputi:

#### a. Pemberdayaan ekonomi, dengan target capaian sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya program pelatihan keterampilan yang relevan seperti menjahit, kerajinan tangan, tata boga, teknologi informasi, atau keterampilan teknis lainnya

- 2) Adanya programpelatihan dan dukungan untuk memulai usaha kecil, termasuk bimbingan dalam manajemen
  - 3) Tersedianya akses ke pinjaman mikro atau hibah untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil
  - 4) Adanya akses yang memudahkan korban mendapatkan pekerjaan yang layak melalui pelatihan kerja, job matching,
- b. Pemenuhan akses pendidikan bagi korban kekerasan, dengan target capaian adanya kesempatan/peluang bagi korban untuk melanjutkan pendidikan formal atau non-formal
  - c. Pemberdayaan psikososial, dengan target capaian Tersedianya layanan dan/atau ruang bagi korban termasuk keluarga korban untuk memulihkan kondisi psikologis pasca pendampingan terhadap kasus baik secara hukum maupun psikologis diberikan
  - d. Pemberdayaan hukum, dengan target capaian adanya pendidikan hukum kepada korban tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kekerasan di masa depan
  - e. Pemberdayaan sosial, dengan target capaian tersedianya program-program pemberdayaan di tingkat komunitas yang mendukung korban dan mendorong lingkungan yang aman dan inklusif, termasuk melibatkan korban untuk terlibat aktif dalam program tersebut.
  - f. Pemberdayaan kesehatan, dengan target capaian sebagai berikut:
    - 1) Terpenuhinya hak korban untuk mendapatkan layanan kesehatan fisik dan mental yang komprehensif
    - 2) Adanya ruang-ruang edukasi tentang kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, untuk meningkatkan kesejahteraan keseluruhan korban

G. Matriks RAD Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025-2028.

A. Matriks Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2025 - 2028

PENCEGAHAN													
No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Aktivitas	Indikator Capaian	TAHUN				Satuan Target	Penanggung Jawab
								2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target		
1.	Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Masyarakat	Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pertemuan di masyarakat, dan kegiatan komunitas di masyarakat	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	10	10	10	10	Kali Sosialisasi	DP3AP2 DIY. Lembaga Terkait : Lembaga Anggota FPKK DIY
			Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (untuk sosialisasi, GEDSI bagi forum/komunitas di DIY)	Jumlah Peringatan	1	1	1	1	Kali Kegiatan	DP3AP2 DIY. Lembaga Terkait : Lembaga Anggota FPKK DIY
			Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek GEDSI bagi forum/komunitas di Kabupaten/Kota (Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan)	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	5	5	5	5	Kali Sosialisasi	DP3AP2 DIY. Lembaga Terkait : LPLPP DIY
			Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Advokasi dan Pendampingan PUG	Jumlah OPD yang mendapat advokasi dan pendampingan PUG	37	37	37	37	OPD	DP3AP2, Lembaga Terkait : BAPPERIDA, BPKA, INSPEKTORAT
			Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Bimtek Norma Kerja Perempuan dan Anak	Jumlah perusahaan Yang mendapatkan Bimtek NKPA	60	60	60	60	Perusahaan	Disnakertrans DIY
			Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Daerah Rawan Bencana	Pelatihan Masyarakat tanggap bencana	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	1	1	1	1	Kali Sosialisasi	BPBD DIY
2.	Edukasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Institusi Pendidikan	Terintegrasinya pendidikan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan ke dalam Aktifitas di satuan pendidikan Kewenangan Provinsi	Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Bagi Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Lembaga Pendidikan (TIM PKK Satuan Pendidikan, Satgas PPK DIY)	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	5	5	5	5	Kali Sosialisasi	DP3AP2 DIY, Lembaga Terkait: Dikspora DIY, SMA, SMK
			Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Pelatihan Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Lembaga Pendidikan (TIM PKK Satuan Pendidikan, Satgas PPK DIY)	Jumlah SDM yang Memperoleh pelatihan	30	30	30	30	Orang	Dinas P3P2 DIY
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Khusus	- 1.01.02.1.01.0065 Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi - 1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi - 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi peserta didik	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	6	6	6	6	Dokumen	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Khusus	- 1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - 1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Satuan Pendidikan bagi Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan di satuan Pendidikan (TPPKSP) dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK DIY)	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	161	161	161	161	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Berbasis Budaya	- 2.22.08.5.10.0001 - Pembinaan Muatan Lokal	Implementasi pendidikan karakter melalui bahan ajar Pendidikan Khas Kejogjaan pada jenjang pendidikan menengah yang mengedepankan pentingnya sikap beretika dan membangun kepedulian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	1	1	1	1	Laporan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY
			3.	Penyusunan KIE Pencegahan dan Penanganan KIPA	Tersusunnya Media Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang pencegahan, penanganan, Layanan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabpaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Penyusunan bahan kampanye (media campaign)/KIE terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah penyusunan KIE yang dilakukan	2	2	2
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabpaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				Penyebarluasan Informasi Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jenis penyebarluasan informasi yang dilaksanakan	3	3	3	3	Jenis KIE	DP3AP2 DIY
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Puspaga dan Tesaga Budaya				Produksi Kontent Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui platform media Sosial	Jumlah konten	75	75	75	75	Konten	DP3AP2 DIY
Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Diseminasi Konten Positif				Fasilitasi Penyebarluasan Informasi melalui Ji TV, Video Tron, Media Sosial, Media Online, Podcast, Diseminasi Konten Positif	Jumlah Konten terkait Perlindungan Perempuan dan Anak melalui berbagai media	1	1	1	1	Paket	Dinas Kominfo DIY
Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Daerah Rawan Bencana				Bantuan peralatan tanggap bencana	Jumlah pemberian bantuan yang dilaksanakan	6	6	6	6	Kali	BPBD DIY
						Edukasi melalui Video	Jumlah Edukasi video yang dibuat	18	18	18	18	Kali	BPBD DIY
			Podcast rawan bencana	Jumlah podcast yang dilakukan	3	3	3	3	Kali	BPBD DIY			



4	Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga	Terselenggaranya pelatihan kepada orang tua , pengasuh dan pengasuh alternatif tentang pengasuhan yang positif, komunikasi yang efektif,sebagai upaya pencegahan kekerasan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Sosialisasi Layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga , fungsi keluarga , dan pendewasaan usia perkawinan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	15	15	15	15	Kali	DP3AP2 DIY.
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga , fungsi keluarga , dan pendewasaan usia perkawinan	Jenis Kegiatan	2	2	2	2	Jenis	DP3AP2 DIY. (PPK8)
		Terselenggaranya Layanan konseling bagi keluarga dalam upaya Peningkatan kualitas Keluarga	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Fasilitasi PUSPAGA DIY	Jumlah Layanan yg di Fasilitasi	1	1	1	1	Layanan	DP3AP2 DIY.
		Terselenggaranya layanan telekonseling bagi anak dan keluarga untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Fasilitasi Tesaga (Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga) DIY	Jumlah Layanan yg di Fasilitasi	1	1	1	1	Layanan	DP3AP2 DIY.
5	Kolaborasi dan Kemitraan	Terjalinnnya kerjasama antar lembaga (termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal) dalam pencegahan dan pennaganan kekerasan .	Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi FPKK DIY	Jumlah Forum Yang difasilitasi	1	1	1	1	Forum	DP3AP2 DIY. Lembaga Terkait : Lembaga Anggota FPKK DIY
						Fasilitasi GT TPPO dan POKJA P3KS	Jumlah Tim/ GT yang difasilitasi	2	2	2	2	Lembaga	DP3AP2 DIY. Lembaga Terkait : DT PP TPPO DIY, Pokja P3KS DIY
			Program Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Hon Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Gugus Tugas DIY Layak Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	16	16	16	16	Lembaga	DP3AP2 DIY. Lembaga Terkait : Gugus Tugas DIY Layak Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabpaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	3	3	3	3	Koordinasi	DP3AP2 DIY. Lembaga Anggota FPKK DIY
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Rapat Pembahasan dan Pencermatan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3	3	3	3	Dokumen	Paniradya Kaistimewan
						Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	3	3	3	3	Dokumen	Paniradya Kaistimewan
6.	Mewujudkan Wilayah / Kawasan Ramah Bagi Perempuan dan Anak	Terwujudnya Provinsi Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Advokasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kalurahan Ramah anak dan DRPPA	Jumlah Kabupaten/Kota yg di Advokasi	5	5	5	5	Kabupaten/Kota	DP3AP2 DIY
7.	Penelitian dan Data	Tersedianya data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kajian Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah kajian yang dilaksanakan	1	1	1	1	Kajian	Biro Bermas
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data GEndr dan Anak dalam Kelembagaan Data Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Penyelenggaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) DIY	Jumlah sistem data yang dikelola	1	1	1	1	Sistem	DP3AP2 DIY
			Penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan kajian resiko bencana	menyusun dokumen kajian resiko bencana	Jumlah dokumen kajian yang dilaksanakan	2	2	2	2	Dokumen	BPBD DIY
			Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas petugas Pengelolaan data Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah SDM yang dilatih	30	30	30	30	Orang	DP3AP2 DIY. Lembaga Terkait : Lembaga Anggota FPKK DIY
			Program Pengelolaan Layanan Gender dan Anak	PEngumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data GEndr dan Anak dalam Kelembagaan Data Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian dan Pemanfaatan Data GEndr dan Anak dalam kelembagaan Data Provinsi	Ekspose data penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Ekspose yg dilakukan	2	2	2	2	Kegiatan	DP3AP2 DIY. Lembaga Anggota FPKK DIY
			B PENANGANAN										
No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Aktivitas	Indikator Capaian	TAHUN				Satuan Target	Penanggung Jawab
								2025	2026	2027	2028		
								Target	Target	Target	Target		
1.	Penyelenggaraan Layanan intervensi dini yang Cepat dan berkualitas	Terlatihnya Tim PPK, SATGAS PPK, SATGAS TPKS, Petugas Lembaga Layanan dalam respon awal terhadap korban kekerasan	Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga layanan penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Satgas PPA DIY dan GT TPPO DIY)	Jumlah Satgas Yang Terlatih	60	60	60	60	Orang	DP3AP2 , UPT Balai PPA DIY
2.	Pengelolaan Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Fasilitasi Lembaga Layanan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Balai PPA dan RDU	Prosentase Korban yang dilayani	100	100	100	100	Persen	UPT Balai PPA dan P2TPAKK RDU

			Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Fasilitasi UPT Balai PPA DIY	Prosentasi Anak Korban kekerasan yang dilayani	100	100	100	100	Persen	UPT Balai PPA
3.	Penyelenggaraan Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Terpenuhinya layanan awal bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan assemen, intervensi krisis	Jumlah korban	175	175	175	175	Korban	P2TPAKK RDU
		Terpenuhinya layanan penjangkauan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	melakukan penjangkauam bagi perempuan dan anak korban kekerasan dari wilayahnya ke tempat yang aman	Jumlah korban	10	10	10	10	Korban	P2TPAKK RDU
		Pengelolaan Kasus Terpenuhinya layanan pengelolaan kasus bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	melakukan pengelooan kasus baik secara inter maupun ekstern	Jumlah korban	175	175	175	175	Korban	P2TPAKK RDU
			Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan pendampingan psikologi, rehabso, rohani, kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah korban	20	20	20	20	Korban	P2TPAKK RDU
			Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga layanan penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Pelatihan Manajemen Kasus Bagi Petugas Layanan berbasis masyarakat (misalnya Satgas PPA, dan FPKK/Satgas Tingkat Kalurahan)	Jumlah SDM Penyedia layanan yang terlatih	60	60	60	60	Orang	DP3AP2, UPT Balain PPA
		Tersedianya perlindungan sementara dan jangka panjang bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam kondisi darurat dan/atau ancaman jiwa	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter, dan Pengasuhan Sementara	Jumlah korban	8	10	12	15	Korban	UPT BPPA
			Program Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Penyediaan Perumahan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Perbekalan Kesehatan; Penyediaan Asrama-Wisma yang Mudah Diakses	Pemenuhan hak-hak dasar seperti pemenuhan kebutuhan permakanan, sandang, sarana prasarana terkait dengan kesehatan, serta penyediaan wisma/ asrama yang layak dan mudah di akses	- Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	30	30	30	30	Korban	Dinas Sosial DIY melalui BRSW
			Program Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Penyelenggaraan layanan Psikologis bagi klien selama berada di dalam balai	- Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	6	6	6	6	Korban	Dinas Sosial DIY melalui BRSPA
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti	Penyediaan Perumahan	Penyediaan bahan makanan dan minuman klien, dukungan penyediaan makan minum klien, dan penyediaan jasa tenaga juru masak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60	60	60	60	Korban	BPRSR Dinas Sosial DIY
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang (berupa pakaian, alat ibadah, penutup & alas kaki), penyediaan perlengkapan kebersihan individu PPKS,	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60	60	60	60	Korban	BPRSR Dinas Sosial DIY
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Penyediaan tabung gas oksigen, bahan-bahan pendukung kesehatan, obat-obatan, tenaga kesehatan, serta perawatan dan pengobatan lokal bagi PPKS	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	60	60	60	60	Korban	BPRSR Dinas Sosial DIY
		Terpenuhinya layanan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan korban melalui mekanisme rujukan	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Penyediaan jasa tenaga penanganan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60	60	60	60	Orang	BPRSR Dinas Sosial DIY
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti	Pemberian Keterampilan Dasar	Penyediaan peralatan & perlengkapan bimbingan keterampilan sederhana	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60	60	60	60	Orang	BPRSR Dinas Sosial DIY
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan & Kesehatan dasar	Penyediaan makan dan minum petugas pendamping pengantaran fasilitas kesehatan dan pendidikan, penyediaan dokumen & materi kegiatan pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60	60	60	60	Orang	BPRSR Dinas Sosial DIY

	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan rujukan dan menerima rujukan	Jumlah korban	30	30	30	30	Korban	P2TPAKK RDU
Tersedianya layanan kesehatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban dan kemudahan akses bagi korban agar korban segera tertangani	Program Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di Dalam Pantl	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Pemenuhan hak dasar terkait dengan kesehatan klien selama berada di dalam balai	- Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pantl Sosial (BPRSW)	30	30	30	30	Korban	Dinas Sosial DIY melalui BRSW
	Program Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pantl	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Pemenuhan hak dasar terkait dengan kesehatan klien selama berada di dalam balai	- Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pantl Sosial (BRSPA)	6	6	6	6	Korban	Dinas Sosial DIY melalui BRSPA
	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memberikan layanan kesehatan pada fase krisis dan pada saat di Rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah korban	20	20	20	20	Korban	P2TPAKK RDU
	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Penyelenggaraan layanan Medis dan Medikolegal Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.	Jumlah korban	5	8	10	12	Korban	UPT BPPA
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Fasilitasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan anak	Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Penyangga dan Disabilitas Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	Persen	Dinas Kesehatan DIY Melalui Bapel Jamkesos DIY
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Peningkatan kapasitas bagi tenaga profesional lembaga pemberi layanan dalam memberikan layanan kesehatan	Puskemas yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak	100	100	100	100	persen	Dinas Kesehatan DIY
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Lansia								
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Penyelenggaraan Layanan Medis dan Medikolegal Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.	Prosentase Korban yang dilayani	100	100	100	100	persen	Dinas Kesehatan DIY, RSI Grhasia, RS Paru Respira
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Lansia								
Tersedianya tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan konseling dan/atau pendampingan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan, secara khusus memiliki perspektif yang tidak bias gender	Program Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di Dalam Pantl	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Penyelenggaraan layanan Psikologis bagi klien selama berada di dalam balai	- Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pantl Sosial (BPRSW)	30	30	30	30	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BRSW
	Program Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pantl	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Penyelenggaraan layanan Psikologis bagi klien selama berada di dalam balai	- Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pantl Sosial (BRSPA)	6	6	6	6	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BRSPA
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Pantl	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penyediaan Alat/bahan untuk kegiatan kantor, penyediaan dukungan penyelenggaraan rapat, penyediaan narasumber/instruktur dan tenaga ahli, penyediaan jasa penyelenggara acara, dan perjalanan dinas	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60	60	60	60	Orang	BPRSR Dinas Sosial DIY
	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Layanan Psikologis Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Korban	35	38	40	42	Orang	UPT BPPA
	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan pendampingan (saat BAP, Sidang ) , konseling psikologis, membuat HPP bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah korban	100	100	100	100	Orang	P2TPAKK RDU

		Tersedianya tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan konsultasi hukum dan/atau pendampingan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, secara khusus memiliki perspektif yang tidak bias gender	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Korban	4	6	8	10	Orang	UPT Balai PPA
			Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	melakukan mediasi dan membuat kesepakatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah korban	15	15	15	15	Orang	P2TPAKK RDU
			Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan Pendampingan Hukum saat BAP, sidang, konseling dan melakukan mediasi	Jumlah Korban	100	100	100	100	Orang	P2TPAKK RDU
			Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memberikan bantuan advokasi Hukum	Jumlah Kasus yang ditangani	10	10	10	10	Kasus	P2TPAKK RDU
		Psikososial dan layanan lainnya : tersedianya tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus memberikan layanan psikososial dan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan korban berdasarkan asesmen, secara khusus memiliki perspektif yang tidak bias gender	Program Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di Dalam Pantii  - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pantii	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial  Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Tersedianya pekerja sosial profesional yang memiliki kompetensi terkait penanganan serta rehabilitasi sosial klien di balai  Tersedianya pekerja sosial profesional yang memiliki kompetensi terkait penanganan serta rehabilitasi sosial klien di balai	- Terpenuhiya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pantii Sosial (BPRSW)  - Terpenuhiya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pantii Sosial (BRSPA)	30	30	30	30	Korban	Dinas Sosial DIY melalui BRSW
			Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Layanan Pengakuan Hukum Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah korban	20	25	30	35	Korban	UPT Balai PPA
		Tersedianya layanan yang membantu korban untuk bisa kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat secara lebih aman	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi  Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas bagi petugas layanan dalam menyusun strategi pemulangan perempuan dan anak korban kekerasan  melakukan reintegrasi, pemulangan dan relokasi diwilayah tempat asal korban atau sesuai kesepakatan korban	Jumlah petugas  Jumlah korban	2	2	2	2	Petugas	UPT Balai PPA
								20	20	20	20	Korban	P2TPAKK RDU
C. PEMBERDAYAAN													
No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Aktivitas	Indikator Capaian	TAHUN				Satuan Target	Penanggung Jawab
								2025	2026	2027	2028		
1.	Pemberdayaan Ekonomi	Terselenggaranya Pelatihan keterampilan khususnya bagi perempuan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Pembinaan dan pendampingan Kelompok Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	250	250	250	250	Orang	DP3AP2. Lembaga Terkait; LPLPP
		Terselenggaranya Pelatihan dan pendampingan memulai usaha kecil, termasuk bimbingan dalam manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Pendidikan dan pelatihan manajemen usaha	Terbentuknya Kelompok Ekonomi Perempuan (KEP) Desa PRIMA yang dibekali manajemen usaha	5	5	5	5	Kelompok	DP3AP2 DIY
		Terfasilitasinya Peningkatan Pemasaran dan Jejaring Pengembangan Usaha	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Fasilitasi branding dan pemasaran produk melalui ekspose produk KEP Desa PRIMA	Jumlah fasilitasi Gelar Potensi untuk ekspose produk Kelompok Ekonomi Perempuan (KEP) Desa PRIMA	1	1	1	1	Kali	DP3AP2
		Tersedianya akses ke pinjaman mikro atau hibah untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Fasilitasi dana hibah serta pendampingan pengelolaan dana hibah untuk KEP Desa PRIMA	Terfasilitasinya pengembangan ekonomi perempuan dengan pemberian akses penguatan modal usaha	10	10	10	10	Kelompok	DP3AP2 DIY
2.	Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Korban Kekerasan	Adanya kesempatan/peluang bagi korban untuk melanjutkan pendidikan formal atau non-formal	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Khusus	- 1.01.02.1.01.0065 Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi - 1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi - 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi peserta didik	Fasilitasi Program Pendidikan Bagi Korban Kekerasan Pada Jenjang Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Fasilitasi Program Pendidikan	6	6	6	6	Laporan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY

B. Matriks Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2025 - 2028

A PENCEGAHAN										
No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Aktivitas	Indikator Capaian	TAHUN				Satuan	Penanggung Jawab
					2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target		
1.	Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Masyarakat	Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pertemuan di Masyarakat, media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas di masyarakat	Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	6	6	6	6	Kali	Bapas Kelas I Yogyakarta
			Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	10	10	10	10	Kali	Kantor Imigrasi Yogyakarta : Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dan Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
			Penerangan hukum terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pertemuan di Masyarakat, media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas di masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	5	5	5	5	Kali	Kejaksanaan Tinggi DIY (Kasi B)
			Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	10	10	10	10	Kali	Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta
			Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	12	12	12	12	Kali	Dinas Sosial PPPA KP
			Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	5	5	5	5	Kali	Dinas P3AP2KB Bantul
			Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	2	2	2	2	Kali	Dinas Sosial PPPA Gunungkidul
			Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan anak di masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	7	7	7	7	Kali	Dinas P3AP2KB Sleman
			Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	1	1	1	1	Kali	RSA UGM
			Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	3	3	3	3	Kali	Rifka Annisa
			Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	10	10	10	10	Kali	Yasanti
				Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	1	1	1	1	Kali	SAPDA
2.	Edukasi Anti Kekerasan di Institusi Pendidikan	Terintegrasinya pendidikan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan ke dalam Aktifitas di satuan pendidikan di DIY	Sosialisasi Anti kekerasan terhadap Anak di Sekolah	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	6	6	6	6	Kali	Bapas Kelas I Yogyakarta
			Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Lembaga Pendidikan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	15	15	15	15	Kali	DP3AP2KB kota Yogyakarta
			Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap Anak	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	11	11	11	11	Kali	Dinsos PPPA Kulon Progo
			Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap Anak	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	2	2	2	2	Kali	Dinas P3AP2KB Bantul
			Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap Anak	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	5	5	5	5	Kali	Dinas Sosial PPPA Gunungkidul
			Pelatihan Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Lembaga Pendidikan (TIM PKK, Satgas PPA DIY)	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1	1	1	1	Kali	Dinas P3AP2KB Sleman
			Mengimplementasikan dan penanaman Nilai-nilai luhur berbasis sekolah serta para remaja melalui Kelompok remaja di tingkat kelurahan (Karang Taruna) guna mengembangkan pendidikan karakter dan budi pekerti. Peningkatan kualitas Remaja Melalui olah seni lukis, Musik, Olah raga.	Jumlah Peserta Pelatihan/ Pendidikan Ketrampilan anak	20	20	20	20	Orang	YLPA DIY
			Pelatihan menjadi agen perubahan dalam mencegah dan menangani Bullying	Jumlah Lokasi Pelatihan	3	3	3	3	Lokasi	LSPPA
3.	Penyusunan KIE Pencegahan dan Penanganan KtPA	Tersusunnya Media Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang pencegahan, penanganan, layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penyusunan bahan kampanye (media campaign)/KIE terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah release informasi pencegahan kekerasan di medsos Bapas Yogyakarta	4	4	4	4	Dokumen	Bapas Kelas I Yogyakarta
			Produksi Kontent Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui platform Instagram, website, Tiktok, dan Facebook	Jumlah release informasi pencegahan kekerasan di medsos Bapas Yogyakarta	2	2	2	2	Dokumen	Bapas Kelas I Yogyakarta
			Penyusunan bahan kampanye (media campaign)/KIE terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah KIE yang di susun	10	10	10	10	Dokumen	Polda DIY dan Polres Kabupaten/Kota

			<div>Penyusunan bahan kampanye (media campaign)/KIE (berupa leaflet/buku saku) terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</div> <div>Jumlah media campaign</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>Jenis</div> <div>DP3AP2KB Kota Yogyakarta</div>
			<div>Jumlah media campaign</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>Dokumen</div> <div>Dinsos PPPA Kulon progo</div>
			<div>Jumlah KIE yang disusun</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>Jenis</div> <div>Dinas P3AP2KB Bantul</div>
			<div>Jumlah KIE yang disusun</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>Jenis</div> <div>Dinas P3AP2KB Gunungkidul</div>
			<div>Leaflet DRPPA, TPPO, Implementasi kesetaraan dan keadilan gender, stop tindak pidana kekerasan seksual</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>Jenis</div> <div>Dinas P3AP2KB Sleman</div>
		<div>Produksi konten atau media kampanye lainnya yang kontekstual sebagai upaya mengedukasi masyarakat melalui media sosial terkait pengalaman perempuan dan pencegahan kekerasan dalam relasi dengan pasangan melalui platform Instagram, website, Tiktok, dan Facebook</div>	<div>Konten</div> <div>20</div> <div>20</div> <div>20</div> <div>20</div> <div>Kali</div> <div>Rifka Annisa</div>
		<div>Produksi Kontent Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui platform Instagram, website, Tiktok, dan Facebook</div>	<div>Konten Sosialisasi Visum et repertum di Instagram RSA.UGM</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>Konten</div> <div>dr. Budiatri Retno Noormaningrum, M.Sc., <u>Sp.FM</u> (RSA UGM)</div>
		<div>Penyusunan bahan kampanye (media campaign)/KIE terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</div>	<div>Jumlah Bahan KIE Yang Disusun</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>Jenis</div> <div>Yasanti</div>
			<div>Jumlah Bahan KIE Yang Disusun</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>Jenis</div> <div>SAPDA</div>
		<div>Produksi Kontent Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui platform Instagram, website, Tiktok, dan Facebook</div>	<div>Jumlah Konten yang di produksi</div> <div>3</div> <div>3</div> <div>3</div> <div>3</div> <div>Konten</div> <div>Yasanti</div>
4.	Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga	<div>Terselenggaranya Layanan konseling bagi keluarga dalam upaya Peningkatan kualitas Keluarga</div>	<div>Sosialisasi Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)</div> <div>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>Kali</div> <div>Dinas PPPA Kabupaten/Kota</div>
			<div>Pengelolaan Aplikasi Layanan Puspaga</div> <div>Jumlah</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>Layanan</div> <div>Kota Yogyakarta</div>
			<div>Fasilitasi PUSPAGA Kabupaten/Kota</div> <div>Jumlah Layanan Puspaga Kabupaten/Kota</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>Layanan</div> <div>Dinas PPPA Kabupaten/Kota</div>
		<div>Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga , fungsi keluarga, dan pendewasaan usia perkawinan</div>	<div>Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>Kali</div> <div>Yasanti</div>
		<div>Adanya pendampingan perempuan dan anak terdampak konflik sosial</div>	<div>Layanan Konsultasi keluarga di 14 KUA Kemantren dan 64 KUA Kapanewon</div> <div>Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan</div> <div>1200</div> <div>1200</div> <div>1200</div> <div>1200</div> <div>Keluarga</div> <div>Kanwil Kemenag DIY</div>
			<div>Layanan Konsultasi keluarga di 14 KUA Kemantren dan 64 KUA Kapanewon</div> <div>Jumlah Calon Pengantin yg memperoleh Bimwin</div> <div>21500</div> <div>21500</div> <div>21500</div> <div>21500</div> <div>Pasangan Caten</div> <div>Kanwil Kemenag DIY</div>
			<div>Bimbingan Remaja Usia Sekolah di tingkat Madrasah Aliyah</div> <div>jumlah siswa yang memperoleh bimbingan</div> <div>7500</div> <div>7500</div> <div>7500</div> <div>7500</div> <div>Siswa</div> <div>Kanwil Kemenag DIY</div>
5.	Kolaborasi dan Kemitraan	<div>Terjalinnnya kerjasama antar lembaga (termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal) dalam pencegahan dan pennaganan kekerasan.</div>	<div>Memperkuat kerjasama antar stakeholder dengan pemerintah daerah, pemerintah kota dan Pemerintah Daerah DIY</div> <div>Jumlah kegiatan kerjasama antar stake holder yang terselenggara</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>Kali</div> <div>Bapas Kelas I Yogyakarta</div>
			<div>Rapat Koordinasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten/Kapanewon, Satgas PPA, Puspaga</div> <div>jumlah kegiatan</div> <div>12</div> <div>12</div> <div>12</div> <div>12</div> <div>Kali</div> <div>Dinsos PPPA Kulon Progo</div>
			<div>Rapat Koordinasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten</div> <div>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>Kali</div> <div>Dinsos PPPA Kulon Progo</div>
			<div>Rapat Koordinasi Lintas Sektor</div> <div>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan</div> <div>3</div> <div>3</div> <div>3</div> <div>3</div> <div>Kali</div> <div>Dinsos PPPA Kulon Progo</div>
			<div>Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten/Kota</div> <div>Jumlah Forum</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>Forum</div> <div>Dinas P3AP2KB Bantul</div>
			<div>Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) kabupaten/Kota</div> <div>Jumlah Koordinasi</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>Kali</div> <div>Dinas Sosial PPPA Gunungkidul</div>
			<div>Fasilitasi GT TPPO dan POKJA P3KS</div> <div>Jumlah Koordinasi</div> <div>6</div> <div>6</div> <div>6</div> <div>6</div> <div>Kali</div> <div>Dinas Sosial PPPA Gunungkidul</div>
			<div>Penguatan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) kabupaten/Kota</div> <div>Jumlah Forum</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>Forum</div> <div>Dinas P3AP2KB Sleman</div>
			<div>Penguatan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang</div> <div>Jumlah Gugus Tugas</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>Forum</div> <div>Dinas P3AP2KB Sleman</div>
			<div>Penguatan HWDI</div> <div>Jumlah Forum</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>Forum</div> <div>Dinas P3AP2KB Sleman</div>
			<div>Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) kabupaten/Kota Kota Yogyakarta</div> <div>Jumlah Koordinasi</div> <div>3</div> <div>3</div> <div>3</div> <div>3</div> <div>Kali</div> <div>DP3AP2KB Kota Yogyakarta</div>
			<div>Fasilitasi Forum Puspa Kota Yogyakarta</div> <div>Jumlah Koordinasi</div> <div>7</div> <div>7</div> <div>7</div> <div>7</div> <div>Kali</div> <div>DP3AP2KB kota yogyakarta</div>
6.	Mewujudkan Wilayah / Kawasan Ramah Bagi Perempuan dan Anak	<div>Terwujudnya Provinsi Ramah Perempuan dan Peduli Anak</div>	<div>Advokasi pengembangan Kalurahan Ramah anak dan DRPPA</div> <div>Jumlah KRPPA</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>Kalurahan /Kelurahan</div> <div>DP3AP2KB kota yogyakarta</div>
			<div>Jumlah KRPPA</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>Kalurahan /Kelurahan</div> <div>Dinsos PPPA Kulon Progo</div>

					Jumlah KRPPA	2	2	2	2	Kalurahan /Kelurahan	Dinas P3AP2KB Bantul	
					Jumlah KRPPA	0	0	0	0	Kalurahan /Kelurahan	Dinas Sosial PPPA Gunungkidul	
					Jumlah KRPPA	1	1	1	1	Kalurahan /Kelurahan	Dinas P3AP2KB Sleman	
					Jumlah KRPPA	3	3	3	3	Kalurahan /Kelurahan	LSPPA	
				Terlatihnya Relawan SAPA dalam merespon kasus, pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi		Jumlah KLA	1	1	1	1	Kab/Kota	DP3AP2KB kota yogyakarta
						Jumlah KLA	1	1	1	1	Kab/Kota	Dinsos PPPA Kulon Progo
						Jumlah KLA	1	1	1	1	Kab/Kota	Dinas P3AP2KB Bantul
						Jumlah KLA	1	1	1	1	Kab/Kota	Dinas Sosial PPPA Gunungkidul
						Jumlah KLA	1	1	1	1	Kab/Kota	Dinas P3AP2KB Sleman
					Pendampingan dan penguatan kapasitas Forum Anak	Jumlah Forum Yang di dampingi	1	1	1	1	Kalurahan /Kelurahan	LSPPA
					PEndampingan dan penguatan kapasitas Forum Anak	Forum Anak	46	46	46	46	Forum Anak	DP3AP2KB kota yogyakarta
					Pelatihan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan bagi aktifis PATBM kalurahan dan kapanewon	Jumlah Forum Yang di dampingi	3	3	3	3	Kalurahan /Kelurahan	LSPPA
					Pelatihan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan bagi aktifis PATBM kalurahan	Jumlah PATBM Yg dilatih	45	45	45	45	Kalurahan /Kelurahan	DP3AP2KB kota yogyakarta
7.	Penelitian dan Data	Tersedianya data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Pengelolaan data Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Laporan bulanan	12	12	12	12	Dokumen	DP3AP2KB kota Yogyakarta		
			Rapat Koordinasi Verval Data Kekerasan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	4	4	4	4	Kali	Dinas Sosial PPPA kulon Progo		
			Pengelolaan data Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		3	3	3	3	Kali	Dinas P3AP2KB Bantul		
			Pengelolaan data Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Laporan bulanan	2	2	2	2	Laporan	Dinas Sosial PPPA Gunungkidul		
			validasi data kekerasan	Jumlah Lembaga yang di validasi	40	40	40	40	Lembaga	UPT PAA Sleman		
			Kajian Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Kajian	1	1	1	1	Dokumen	SAPDA		
			Pengelolaan data Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	Dokumen	SAPDA		
B	PENANGANAN											
No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Aktivitas	Indikator Capaian	TAHUN				Satuan	Penanggung Jawab		
					2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target				
1.	Layanan intervensi dini yang cepat dan berkualitas	Terlatihnya Tim PPK, SATGAS PPK, SATGAS TPKS, Petugas Lembaga Layanan dalam respon awal terhadap korban KtPA	Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah pelatihan yang diberikan	1	1	1	1	Kegiatan	Polda DIY, Polres/polresta		
			Peningkatan Kapasitas Bagi Lembaga Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (contohnya : Mitra Keluarga, Satgas Sigrak, relawan SAPA, Petugas Kesehatan, tingkat kota sampai dengan Kelurahan	Jumlah pelatihan yang diberikan	3	3	3	3	Kegiatan	DP3AP2KB kota yogyakarta		
				Jumlah pelatihan yang diberikan	1	1	1	1	Kegiatan	Dinsos PPPA Kulon Progo		
				Jumlah pelatihan yang diberikan	1	1	1	1	Kegiatan	Dinas P3AP2KB Bantul		
				Jumlah pelatihan yang diberikan	1	1	1	1	Kegiatan	Dinas Sosial PPPA Gunungkidul		
				jumlah peserta Peningkatan Kanasitas	103	103	103	103	Orang	Dinas P3AP2KB Sleman		
				Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Kegiatan	SAPDA		
2.	Pengelolaan Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Fasilitasi Lembaga Layanan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan di Kabupaten/Kota	Fasilitasi UPTD PPA Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	5	5	5	5	Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota		
			Rapat Koordinasi PPA	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	4	4	4	4	Kali	Dinsos PPPA Kulon Progo		
			Rapat Koordinasi UPTD PPA	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	12	12	12	12	Kali	Dinsos PPPA Kulon Progo		
			Rapat Koordinasi FPKK Kabupaten	Jumlah Kegiatan	4	4	4	4	Kali	Dinsos PPPA Kulon Progo		
			Rapat Koordinasi FPKK Kapanewon	Jumlah Kegiatan	12	12	12	12	Kali	Dinsos PPPA Kulon Progo		
3.	Penyelenggaraan Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Terpenuhinya layanan awal bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban	Peningkatan kapasitas bagi tenaga layanan pengaduan (di lembaga anggota FPKK) lembaga layanan dalam merespon aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota	Jumlah pelatihan yang diberikan	5	5	5	5	Kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota (5 Kab/Kota)		
			Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan layanan pengaduan	Jumlah perempuan yang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan	300	300	300	300	Orang	UPT PPA Kabupaten/Kota (5 Kab/Kota)		
			Layanan Gelar Kasus	Jumlah layanan Gelar kasus	100	100	100	100	Kali	UPT PPA Kabupaten/Kota (5 Kab/Kota)		
			Pengelolaan Aplikasi LAYANAN PPA	Jumlah aplikasi	1	1	1	1	Aplikasi	UPT PPA Kota Yogyakarta		
			Konsultasi dan Pendampingan Hukum Hukum, Konseling Psikologi, dan Koordinasi jejaring layanan	Prosentase Kasus yang dilayani	100	100	100	100	Persen	Rifka Annisa Yogyakarta		

Terpenuhinya <b>layanan Penjangkauan</b> bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban	Peningkatan kapasitas bagi tenaga layanan penjangkauan	Jumlah pelatihan yang diberikan	5	5	5	5	Kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota (5 Kab/Kota)
	Layanan penjangkauan dan pendampingan korban	jumlah penjangkauan	300	300	300	300	Orang	UPT PPA Kabupaten/Kota (5 Kab/Kota)
	Fasilitasi Forum Satgas Sigrak	jumlah fasilitasi	100	100	100	100	Persen	UPT PPA Kota Yogyakarta
	sosialisasi SOP dan SPP Satgas	jumlah sosialisasi	100	100	100	100	Persen	UPT PPA Kota Yogyakarta
	Sosialisasi Kontak Pengaduan di lingkup Pimpinan Pondok Pesantren, staf pengajar dan santri	jumlah pondok pesantren yang mendapatkan sosialisasi	440	440	440	440	Lembaga	Kanwil Kemenag DIY
Tersedianya <b>perlindungan sementara</b> dan jangka panjang bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam kondisi darurat dan/atau mengancam jiwa	Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter, dan Pengasuhan Sementara	Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang membutuhkan layanan rumah aman yang terlayani	100	100	100	100	Persen	UPT PPA Kabupaten/Kota (5 Kab/Kota)
Terpenuhinya <b>layanan berkelanjutan</b> sesuai dengan kebutuhan korban melalui mekanisme rujukan	Penyusunan dan sosialisasi mekanisme Rujukan antar lembaga	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Kegiatan	UPT PPA Kabupaten/Kota (5 Kab/Kota)
	Penerimaan permohonan perlindungan terhadap Saksi dan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang direkomendasikan dari Instansi/Lembaga yang tergabung dalam Jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) D.I Yogyakarta	Jumlah permohonan perlindungan terhadap Saksi dan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang direkomendasikan dari Instansi/Lembaga yang tergabung dalam Jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) D.I Yogyakarta	5	5	5	5	Permohonan	LPSK berdasarkan peraturan perundang-undangan Perlindungan Saksi dan Korban
	Terlaksananya Layanan Perlindungan Saksi dan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di wilayah D.I Yogyakarta	Jumlah Layanan Perlindungan Saksi dan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di wilayah D.I Yogyakarta	5	5	5	5	Layanan	LPSK berdasarkan peraturan perundang-undangan Perlindungan Saksi dan Korban
	Penyusunan dan sosialisasi mekanisme Rujukan antar lembaga	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	Dokumen	SAPDA
Tersedianya <b>layanan kesehatan</b> yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban dan kemudahan akses bagi korban agar korban segera tertangani	Fasilitasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan anak (Layanan Kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan jaminan kesehatan lainnya)	Prosentase layanan kesehatan yang di jaminan	100	100	100	100	Persen	RS. Di DIY yang tergabung dalam FPKK DIY
	Peningkatan kapasitas bagi tenaga profesional lembaga pemberi layanan dalam memberikan layana kesehatan terutama dalam fase krisis terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah Pelatihan yang diberikan	5	5	5	5	Kali	RS. Di DIY yang tergabung dalam FPKK DIY
	Penyelenggaraan Layanan Medis dan Medikolegal Untuk Korban Kekeerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Pendampingan korban yang memerlukan layanan medis	100	100	100	100	Persen	UPT PPA Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Layanan Medis dan Medikolegal Untuk Korban Kekeerasan Terhadap Perempuan dan Anak.	Prosentase layanan kesehatan	100	100	100	100	Persen	RS. Di DIY yang tergabung dalam FPKK DIY
Layanan <b>Pendampingan Psikologis</b> : tersedianya tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan konseling dan/atau pendampingan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan, secara khusus memiliki perspektif yang tidak bias gender	Penyelenggaraan layanan psikologis	Terselenggarakan-nya layanan psikologis bagi korban kekerasan	100	100	100	100	Persen	RS. Di DIY yang tergabung dalam FPKK DIY
	Penyelenggaraarn layanan Psikologis bagi Korban	Jumlah Layanan	10	10	10	10	Kali	SAPDA
	Penyelenggaraarn layanan Psikologis bagi Korban	Prosentase Layanan	100	100	100	100	Persen	UPT PPA Kabupaten/Kota (5 Kab/Kota)
	Peningkatan kapasitas bagi tenaga profesional lembaga pemberi layanan dalam memberikan pendampingan secara psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Meningkatkan Kapasitas tenagaKonselor Psikolog UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam memberikan pendampingan secara psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota
Layanan <b>Pendampingan Hukum</b> : tersedianya tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan konsultasi hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, secara khusus memiliki perspektif yang tidak bias gender	Peningkatan kapasitas bagi tenaga profesional lembaga pemberi layanan dalam memberikan pendampingan secara hukum mulai dari aduan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Meningkatkan Kapasitas Konselor Hukum UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam memberikan pendampingan secara hukum mulai dari aduan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	5	5	5	5	Kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota (5 Kab/Kota)



			Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Penyelenggaraan layanan bantuan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul dengan merujuk jejaring Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang membutuhkan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum	100	100	100	100	Persen	UPT PPA Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Layanan	10	10	10	10	Kasus	SAPDA
		Psikososial dan layanan lainnya : tersedianya tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus memberikan layanan psikososial dan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan korban berdasarkan asesmen, secara khusus memiliki perspektif yang tidak bias gender	Peningkatan kapasitas bagi tenaga profesional lembaga pemberi layanan dalam memberikan pendampingan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Meningkatkan Kapasitas tenaga Pekerja Sosial UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam memberikan pendampingan psikososial bagi perempuan dana anak korban kekerasan	5	5	5	5	Kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota (5 Kab/Kota)
			Penyelenggaraan Layanan Psikologis Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Layanan Konseling Psikologi yang diselenggarakan oleh Konselor Psikolog UPTD PPA Kabupaten Bantul bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang membutuhkan layanan penguatan konseling Psikologis	100	100	100	100	Persen	UPT PPA Kabupaten/Kota (5 Kab/Kota)
		Layanan <b>Penegakan Hukum</b> Bagi Korban KtPA : Tersedianya Layanan Penegakan hukum Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Penyelenggaraan Layanan Penegakan Hukum Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Perkara tindak pidana kekerasan perempuan dan anak dapat ditangani	100	100	100	100	Persen	Polda DIY, Polres Kulonprogo, Polres Bantul, Polres Gunungkidul, Polres Sleman, Polresta Yogyakarta
			Penyelenggaraan Layanan Penegakan Hukum Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Layanan Pendampingan Tenaga Ahli)	jumlah layanan pendampingan tenaga ahli	100	100	100	100	Kasus	UPT PPA Kabupaten/Kota (5 Kab/Kota)
			Terlaksananya Layanan Pemulihan berupa Bantuan Rehabilitasi Medis, Psikologis dan Psikososial bagi Saksi dan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di wilayah D.I Yogyakarta	Jumlah Layanan Pemulihan berupa Bantuan Rehabilitasi Medis, Psikologis dan Psikososial bagi Saksi dan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di wilayah D.I Yogyakarta	5	5	5	5	Layanan	LPSK berdasarkan peraturan perundang-undangan Perlindungan Saksi dan Korban
			Terlaksananya Fasilitasi Penghitungan Restitusi bagi Korban Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di wilayah D.I Yogyakarta	Jumlah Layanan Penghitungan Restitusi bagi Korban Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di wilayah D.I Yogyakarta	5	5	5	5	Layanan	LPSK berdasarkan peraturan perundang-undangan Perlindungan Saksi dan Korban
		Pemulihan dan Reintegrasi Sosial dan Pemulangan : Tersedianya layanan yang membantu korban untuk bisa kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat secara lebih aman	Penyelenggaraan Layanan Pemulihan dan Reintegrasi sosial dan PEMulangan	Jumlah Pemerlu layanan yang dilayani	20	20	20	20	Orang	Bapas Kelas I Yogyakarta
			Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban	jumlah layanan spesifik untuk pemulihan korban	15	15	15	15	Orang	UPT PPA Kota Yk
			Pemenuhan Kebutuhan Dasar(Sandang, pangan, Papan, kebutuhan mandi) serta Layanan Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan dasar dan optimalnya kesehatan ABH	100	100	100	100	Persen	LPKA Kelas II Yogyakarta
C.	PEMBERDAYAAN									
No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Aktivitas	Indikator Capaian	TAHUN				Satuan	Penanggung Jawab
					2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target		
1.	Pemberdayaan Ekonomi	Terselenggaranya Pelatihan keterampilan khususnya bagi perempuan	Pelatihan pengembangan ekonomi dan pendampingan usaha	kelompok usaha perempuan yang dilatih	1	1	1	1	Kelompok	LSPPA
			Pembinaan dan pendampingan kelompok Ekonomi masyarakat terutama Kelompok ekonomi perempuan.	Jumlah Kegiatan Pembinaan	3	4	4	4	Kali	YASANTI
			Pembinaan, pendampingan, dan pelatihan kelompok masyarakat terutama kelompok ekonomi perempuan (misalnya: KEP Desa Prima, Rintisan Usaha, P2WKSS)	Jumlah Kegiatan Pelatihan	11	11	11	11	Kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota
			Pelatihan keterampilan bagi anggota organisasi perempuan (GOW, DWP, dan PKK)	Jumlah Kegiatan Pelatihan	5	5	5	5	Kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota

		Adanya program pelatihan dan dukungan untuk memulai usaha kecil, termasuk bimbingan dalam manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan.	Pelatihan pemasaran dan keuangan bagi Rintisan Usaha, Desa Prima, P2WKSS, dan Organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan Pelatihan	2	2	2	2	Kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota
			Pelatihan kewirausahaan bagi anggota organisasi Perempuan (GOW, DWP, dan PKK)	Jumlah Kegiatan Pelatihan	5	5	5	5	Kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota
			Pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan dan Berwirausaha	Jumlah Kegiatan Pelatihan	3	4	4	4	Kali	YASANTI
			Fasilitasi terhadap korban mendapatkan pekerjaan yang layak melalui pelatihan kerja, job matching, dan jaringan kerja	Jumlah Fasilitasi yang dilakukan	3	3	3	3	Kali	YASANTI
2.	Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Korban Kekerasan	Adanya kesempatan/peluang bagi korban untuk melanjutkan pendidikan formal atau non-formal	Penyediaan Pendidikan Bagi Anak yang berhadapan dengan hukum	Terpenuhinya Pendidikan ABH	100	100	100	100	Persen	LPKA Kelas II Yogyakarta
			Pemenuhan Pembinaan Kepribadian bagi ABH	Pembinaan Bela Negara, Pramuka, Kesenian dan Olahraga	100	100	100	100	Persen	LPKA Kelas II Yogyakarta
			Pemenuhan Pelatihan Ketrampilan bagi ABH	Pelatihan Ketrampilan Baja Ringan, Boga, Menanam sayur	100	100	100	100	Persen	LPKA Kelas II Yogyakarta
3.	Pemberdayaan Psikososial	Tersedianya layanan dan/atau ruang bagi korban termasuk keluarga korban untuk memulihkan kondisi psikologis pasca pendampingan terhadap kasus baik secara hukum maupun psikologis (Dukungan Psikologis dan Support Group)	Support Group bagi sesama penyintas	Jumlah Support Group yang dilakukan	3	3	3	3	Kali	DP3AP2KB Kota Yogyakarta
				Jumlah Support Group yang dilakukan	1	1	1	1	Kali	SAPDA
			Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	2	2	2	2	Kali	YASANTI
		Terpenuhinya Pembinaan Kepribadian	Pembinaan Kepribadian Bagi ABH	Pembinaan Bela Negara, Pramuka, Kesenian dan Olahraga	100	100	100	100	Persen	LPKA Kelas II Yogyakarta
		Terpenuhinya Pelatihan Ketrampilan	Pelatihan Ketrampilan bagi ABH	Pelatihan Ketrampilan Baja Ringan, Boga, Menanam sayur dalam pot	100	100	100	100	Persen	LPKA Kelas II Yogyakarta
4.	Pemberdayaan Sosial	tersedianya program-program pemberdayaan di tingkat komunitas yang mendukung korban dan mendorong lingkungan yang aman dan inklusif, termasuk melibatkan korban untuk terlibat aktif dalam program tersebut	Pelatihan Pengasuhan Anak yang memperhatikan Iptek dan Imtag Berbasis budaya DI.Yogyakarta pada lembaga pengasuhan anak yang profesional	Kegiatan pertemuan	2	2	2	2	Kali	YLPA
			Monitoring dan evaluasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pasca rehabilitasi sosial , dan kembali pada keluarga	Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi	1	1	1	1	Kali	YLPA
			Fasilitasi konsultasi keagamaan bagi perempuan dan anak pasca mengalami kekerasan	Jumlah Penyuluh agama yang terbina	50	50	50	50	Orang	Kanwil Kemenag DIY

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.